



BUPATI TELUK WONDAMA
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI TELUK WONDAMA
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TELUK WONDAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK WONDAMA,

Menimbang : bahwa dengan memperhatikan dan menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah dan untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
16. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai

Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 842);

17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
18. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Wondama (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TELUK WONDAMA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Teluk Wondama.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama.
3. Bupati adalah Bupati Teluk Wondama.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
6. Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS, PPPK dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang ASN.
8. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.
9. Basic Tambahan Penghasilan Pegawai adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria – kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
11. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran ASN dalam satu bulan disahkan oleh pejabat berwenang.
12. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.
13. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama organisasi sesuai dengan tugas fungsi serta mandat yang diemban.
14. Indikator Kinerja Individu adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja pegawai berdasarkan tugas fungsi atau tugas jabatan sesuai tanggungjawab yang diberikan.
15. Capaian Kinerja adalah Realisasi kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam indikator kinerja.
16. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara

- terus-menerus karena alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak masuk kerja dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
17. Cuti bersalin adalah cuti yang diberikan kepada ASN yang mengalami persalinan pertama, kedua dan ketiga dengan jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan.
 18. Cuti Sakit adalah cuti yang diberikan kepada ASN yang mengalami sakit lebih dari 14 (empat belas) hari dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat ditambah paling lama 6 (enam) bulan.
 19. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
 20. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
 21. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Teluk Wondama yang bertindak dalam kapasitas Bendahara Umum Daerah.
 22. Pengelolaan Keuangan Daerah Adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyusunan rancangan APBD, Perubahan APBD, Pengelolaan Kas, Penatausahaan Keuangan Daerah, Akuntansi Keuangan Daerah, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan Keuangan Daerah serta Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pasal 2

Pemerintah Daerah dapat memberikan TPP kepada Aparatur Sipil Negara yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten 'Teluk Wondama dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II PRINSIP TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 3

- (1) Kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.

- (2) Akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Proporsionalita dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai.
- (4) Efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.
- (5) Keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai PNS.
- (6) Kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan PNS.
- (7) Optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB III
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 4

- (1) TPP diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama.
- (2) Besaran TPP yang diberikan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Kelas jabatan.
- (3) TPP bagi PNS Fungsional yang berubah kelas jabatan karena kenaikan pangkat pada tahun 2023, TPP kelas jabatan baru akan dibayarkan pada Tahun Anggaran berikutnya.
- (4) TPP tidak diberikan kepada PNS yang:
 - a. diperbantukan/dipekerjakan pada instansi lain;
 - b. ditugaskan sebagai Penjabat Kepala Desa dan Aparat Desa baik definitif maupun Pelaksana Tugas;
 - c. nyata-nyata tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Pemerintah Daerah berdasarkan pernyataan dari atasan langsungnya;
 - d. diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Pertimbangan Kepegawaian serta tidak diizinkan masuk bekerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - e. berstatus sebagai Pegawai Titipan
 - f. tugas belajar baik mandiri maupun biaya Pemerintah Daerah; dan

- g. sedang menjalani Cuti Besar, Cuti Melahirkan atau Cuti di luar Tanggungan Negara.
- (5) TPP bagi PNS pindahan dari daerah lain diberikan kepada yang bersangkutan pada tahun anggaran berikutnya sepanjang sudah dianggarkan dalam belanja gaji.
 - (6) TPP dibayarkan sebesar 50% dari besaran TPP sesuai kelas jabatan bagi Guru yang bersertifikasi dan penerima Tunjangan Khusus Guru dengan tetap memperhatikan perhitungan Produktivitas kerja dan Disiplin Kerja.
 - (7) Pegawai dengan Perjanjian Kerja (P3K) Guru Ahli Pertama di bayarkan TPP sebesar TPP PNS Kelas 8 khusus untuk Guru P3K yang sudah bersertifikasi TPP dibayarkan sebesar 50% dari besaran TPP kelas 8.

BAB IV KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 5

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan berdasarkan kriteria:

- a. Prestasi Kerja;
- b. Beban Kerja
- c. Kondisi Kerja;
- d. Tempat bertugas; dan
- e. Kelangkaan Profesi.

Pasal 6

TPP Berdasarkan Prestasi Kerja;

- a. TPP berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada seluruh PNS;
- b. Besaran TPP berdasarkan prestasi kerja sebesar 5% s/d 101% dari Basic TPP; dan
- c. Besaran alokasi TPP berdasarkan prestasi kerja dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:

$$\text{TPP PK} = \% \times \text{B TPP}$$

TPPPK	=	Alokasi TPP berdasarkan
BTTP	=	Basic TPP

Pasal 7

TPP Berdasarkan Beban Kerja;

- a. TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada seluruh PNS;
- b. Besaran TPP berdasarkan beban kerja mulai dari 8% hingga 250 % dari basic TPP sesuai dengan kelas Jabatan yang terdapat pada Lampiran Peraturan Bupati ini; dan
- c. Besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:

$$\text{TPP BK} = \% \text{ BK perjabatan} \times \text{B TPP}$$

A TPPBK	=	Alokasi TPP berdasarkan
% BK	=	Persentase beban kerja
B TPP	=	Basic TPP

Pasal 8

TPP Berdasarkan Kondisi Kerja;

- a. TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada seluruh Inspektur, Inspektur Pembantu, Auditor, Dokter serta PNS yang menduduki jabatan fungsional medis di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah;
- b. Besaran TPP berdasarkan Kondisi Kerja dimulai dari 5% sampai 200% sesuai dengan kelas jabatan yang tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini; dan
- c. Besaran alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:

$$\text{TPP BK} = \% \text{ KK perjabatan} \times \text{B TPP}$$

A TPPKK	=	Alokasi TPP berdasarkan
% KK	=	Persentase kondisi kerja
B TPP	=	Basic TPP

Pasal 9

TPP Berdasarkan Tempat Bertugas;

- a. TPP berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada PNS fungsional yang bertugas pada wilayah II dan III;
- b. Besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan 1% sampai 20% dan besaran basic TPP sesuai dengan kelas jabatan yang tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini; dan
- c. Besaran alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:

$$\text{TPPKP} = (\% \text{ TB perjabatan} \times \text{B TKP})$$

A TPPTB	=	Alokasi TPP berdasarkan
% TB	=	Persentase Kelangkaan Profesi
B TPP	=	Basic TPP

Pasal 10

TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi;

- a. TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Sekretaris daerah, Dokter dan semua PNS Fungsional;
- b. Besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan 2% sampai 250% dan besaran basic TPP sesuai dengan kelas jabatan yang tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini; dan
- c. Besaran alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:

$$\text{TPPKP} = (\% \text{ KP perjabatan} \times \text{B TPP})$$

A TPPKP	=	Alokasi TPP berdasarkan Kelangkaan
% KP	=	Persentase kelangkaan profesi per
B TPP	=	Basic TPP

BAB V PENETAPAN BESARAN TPP

Pasal 11

- (1) Besaran TPP ditetapkan berdasarkan parameter sebagai berikut:
 - a. Kelas Jabatan;
 - b. Indeks kapasitas Fiskal Daerah;
 - c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
 - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran TPP yang diberikan diperoleh menggunakan Rumus:
(Besaran Tunjangan Kinerja BPK per Kelas Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (Indeks Kapasitas Fiskal Daerah) x (Indeks Kemahalan Konstruksi) x (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah).
- (3) Besaran TPP per kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENILAIAN PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu
Pembayaran

Pasal 12

- (1) Pembayaran TPP setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayar berdasarkan pada:
 - a. Penilaian produktivitas kerja sebesar 70% dari besaran TPP yang diterima PNS; dan
 - b. Penilaian disiplin kerja sebesar 30% dari TPP yang diterima PNS.
- (3) Penilaian Produktifitas Kerja dilakukan berdasarkan capaian pelaksanaan tugas sesuai uraian tugas jabatan.
- (4) Penilaian disiplin kerja berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai pada saat masuk kerja dan pulang kerja.
- (5) Uraian tugas jabatan/kinerja proses bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus selaras dengan indikator kinerja utama/indikator kinerja individu atasan langsung secara berjenjang sesuai dengan jabatannya, untuk mencapai kinerja output/outcome.

Bagian Kedua
Produktivitas Kerja

Pasal 13

- (1) Produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan capaian indikator kinerja proses dan dikategorikan sebagai berikut:
 - a. > 50% kategori Baik dan dihitung 100%;
 - b. 41% sampai dengan 50 % kategori Cukup dan dihitung 75%;
 - c. 21% sampai dengan 40 % kategori Sedang dan dihitung 50%; dan
 - d. 0 sampai dengan 20% kategori Kurang dan dihitung 25%. .
- (2) Capaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) divalidasi oleh atasan langsung.
- (3) Ketentuan validasi oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi produktivitas kerja individu Sekretaris Daerah dan Staf Ahli.

Bagian Ketiga
Disiplin Kerja

Pasal 14

- (1) Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4)) ditentukan berdasarkan indikator kehadiran PNS meliputi:
 - a. terlambat masuk kerja;
 - b. pulang sebelum waktunya; dan
 - c. tidak masuk kerja.
- (2) Dalam melakukan perhitungan Tingkat Kehadiran Dinas Luar dan sakit yang dibuktikan dengan Surat Tugas dan Surat Keterangan Sakit dari Dokter, dihitung sebagai masuk bekerja.
- (3) Penghitungan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis elektronik dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (4) Penghitungan absensi apel pagi berbasis elektronik dilaksanakan oleh Bagian Organisasi.

Pasal 15

- (1) Penghitungan Tingkat kehadiran dilakukan dengan Rumus sesuai dengan indikator kehadiran, sebagai berikut:
 - a. PNS yang terlambat datang 10 (sepuluh) menit sampai dengan kurang dari 31 (tiga puluh satu) menit atau pulang mendahului 1 (satu) menit sampai dengan kurang dari 31 (tiga puluh satu) menit dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar:
 $0,5\% \times \text{jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului};$
 - b. PNS yang terlambat datang dan/atau pulang mendahului 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 61 (enam puluh satu) menit dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar:
 $1\% \times \text{jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului};$
 - c. PNS yang terlambat datang dan/atau pulang mendahului 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 91 (sembilan puluh satu) menit dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar:
 $1,25\% \times \text{jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului};$
 - d. PNS yang terlambat datang dan/atau pulang sama dengan atau lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar:
 $1,5\% \times \text{jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului};$

- e. PNS yang tidak mengikuti apel pada hari Senin, Rabu dan Jumat pada hari kerja dikenakan Pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar: 2% kecuali bagi PNS tidak mengikuti Apel dan Upacara dengan alasan yang sah;
 - f. PNS yang tidak melakukan presensi kedatangan atau kepulangan dikenakan Pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar:
1,5% x jumlah hari tidak melakukan presensi kedatangan atau kepulangan;
 - g. PNS yang tidak masuk bekerja karena menjalani cuti, dikenakan Pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar:
1,5% x jumlah hari kerja karena cuti;
 - h. PNS yang tidak masuk bekerja dengan keterangan yang sah dan bukan kedinasan dikenakan Pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar:
2% x jumlah hari tidak masuk bekerja;
 - i. PNS yang tidak masuk bekerja tanpa keterangan dikenakan Pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar:
3% x jumlah hari tidak masuk bekerja;
 - j. PNS yang mendapatkan dispensasi tidak masuk bekerja karena menningikuti kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan kedinasan, dikenakan Pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar:
2% x jumlah hari kerja pemberian dispensasi;
 - k. PNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan secara terus menerus pada hari kerja yang ditetapkan pada bulan berkenaan, maka tingkat kehadiran dianggap nol.
- (2) Pengurangan Tingkat Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan Tingkat Ketidakhadiran PNS.

Pasal 16

- (1) Dalam hal terjadi kendala teknis pada saat pengisian daftar hadir elektronik dikarenakan kerusakan peralatan, sidik jari atau identitas lain PNS tidak terbaca dalam peralatan dan/atau belum terdapat peralatan maka pengisian tingkat kehadiran dilakukan secara manual dan dilampir dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang tembusannya disampaikan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Dalam hal pengisian tingkat kehadiran dilakukan secara manual, maka kehadiran tetap diperhitungan sebesar 100%.

Pasal 17

- (1) PNS yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik dan/atau jam pulang tidak dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran.
- (2) PNS pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan pengaturan shift jam kerja di atas jam kerja efektif yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik, keabsahan kehadiran dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Atasan Langsung.
- (3) PNS yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan kedinasan tidak dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran.
- (4) Tugas Kedinasan di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dinyatakan dengan Surat Perintah Tugas atau Surat Keterangan Melaksanakan Tugas Kedinasan.

Pasal 18

- (1) PNS yang sedang dalam penahanan oleh pihak yang berwajib tidak diberikan tunjangan selama masa proses hukum berlangsung.
- (2) PNS yang sedang dalam penahanan oleh pihak yang berwajib apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan bahwa PNS yang bersangkutan tidak bersalah atau apabila berdasarkan proses penyidikan oleh aparat penegak hukum dinyatakan kurang bukti sehingga diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) baik oleh Kepolisian maupun Kejaksaan, maka Tunjangan dibayarkan pada bulan berikutnya.
- (3) Semua pengurangan tingkat kehadiran yang disebabkan karena tidak mengisi absensi, datang terlambat atau pulang mendahului waktu maksimal adalah sebesar pagu nominal tingkat kehadiran.

Pasal 19

TPP dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah pada kelompok penyediaan gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara.

Pasal 20

- (1) TPP dibayarkan sebulan sekali selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan berikutnya sesuai dengan daftar rekapitulasi per

- perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Daftar rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke bagian Organisasi guna diverifikasi selambat-lambatnya tanggal 10.
 - (3) Dalam hal tanggal 10 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertepatan pada hari libur, maka penyampaian daftar Rekapitulasi dilaksanakan pada hari kerja setelahnya.
 - (4) Perhitungan TPP dilakukan dengan menggunakan format Perhitungan TPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
 - (5) TPP dapat diverifikasi dan proses pembayaran dapat dilakukan apabila sudah memenuhi persyaratan dokumen sebagai berikut:
 - a. Dokumen SAKIP OPD (khusus untuk syarat TPP triwulan I)
 - b. Rekap Daftar Hadir Harian per bulan per OPD
 - c. Rekap Daftar Hadir Apel per bulan per OPD
 - d. Lembar menu data per orang per bulan pada menu perhitungan
 - e. Lembar Produktivitas Kerja per orang per bulan
 - f. Rekap perhitungan per orang per bulan
 - g. Rekap perhitungan TPP per OPD per bulan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Uang Honorarium dapat diberikan kepada:
 - a. Menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pejabat Pengadaan, Pejabat Pemeriksa Hasil Pemeriksaan (PjPHP)/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP), Pokja Pemilihan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Tim Verifikasi TPP; dan
 - b. Menjabat sebagai pengelola keuangan daerah dapat diberikan honorarium pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan standar harga yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam Ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama (Berita Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2016 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 tentang

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama (Berita Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2018 Nomor 18) Wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara.

- (4) Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatas yang tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara tidak dibayarkan TPP.
- (5) TPP dibayarkan kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai meyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Pasal 22

- (1) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas menerima TPP tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam Jabatan sebagai Pelaksana Tugas.
- (2) Pejabat setingkat yang merangkap Pelaksana Tugas jabatan lain menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari dari TPP yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya.
- (3) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan sementara yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas hanya menerima TPP pada Jabatan TPP ASN Pegawai yang tertinggi.
- (4) TPP bagi Pegawai yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Pelaksana Tugas.
- (5) Pemberian TPP bagi Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3), dan ayat (4) yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Teluk Wondama Nomor 8 tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Teluk Wondama Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Teluk Wondama.

Salinan ~~sesuai~~ dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ROBERT M. B. NUNAKI, SH
NIP. 19760410-200312 1 007

Ditetapkan di Rasiei
pada tanggal 19 Januari 2023

BUPATI TELUK WONDAMA,

CAP/TTD

HENDRIK S. MAMBOR

Diundangkan di Rasiei
pada tanggal 19 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA,

CAP/TTD

DENNY SIMBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA TAHUN 2023 NOMOR 11

Lampiran I : Peraturan Bupati Teluk Wondama
 Nomor : 11 Tahun 2023
 Tanggal : 19 Januari 2023

DAFTAR BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
 PADA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD

NO.	Nama Jabatan	Jenis Jabatan	Kelas	BESARAN TPP PER JABATAN/BULAN
A.	B. SEKRETARIAT DAERAH			
	Sekretaris Daerah	Pimpinan tinggi Madya	15	18.674.847,42
	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pimpinan Tinggi Pratama	14	8.321.168,66
	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Pimpinan Tinggi Pratama	14	8.321.168,66
	Asisten Bidang Administrasi Umum	Pimpinan Tinggi Pratama	14	8.321.168,66
	Staff Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan Politik	Pimpinan Tinggi Pratama	13	7.281.314,54
	Staff Ahli Bidang Sumber Daya Masyarakat dan SDM	Pimpinan Tinggi Pratama	13	7.281.314,54
	Staff Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	Pimpinan Tinggi Pratama	13	7.281.314,54
	A.I. BAGIAN PEMERINTAHAN			
	Kepala Bagian Pemerintahan	Administrator	12	5.818.650,47
	Kasubbag Administrasi Pemerintahan	Pengawas	9	3.360.146,26
	Kasubbag Administrasi Kewilayahan	Pengawas	9	3.360.146,26
	Kasubbag Kerja Sama dan Otonomi Daerah	Pengawas	9	3.360.146,26
	Bendahara Pembantu Pengeluaran	Pelaksana	7	1.560.456,02
	Analisis Pemerintahan	Pelaksana	7	1.560.456,02
	Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah	Pelaksana	7	1.560.456,02
	Pengelola Data	Pelaksana	6	1.466.938,51
	Pengadministrasi Pemerintahan	Pelaksana	5	1.414.533,24
	Pengadministrasi Umum	Pelaksana	5	1.414.533,24
	Registrar	Pelaksana	5	1.414.533,24
	A.II. BAGIAN HUKUM			
	Kepala Bagian Hukum	Administrator	12	5.818.650,47
	Kasubbag Perundang-Undangan	Pengawas	9	3.360.146,26
	Kasubbag Bantuan Hukum	Pengawas	9	3.360.146,26

NO.	Nama Jabatan	Jenis Jabatan	Kelas	BESARAN TPP PER JABATAN / BULAN
	Kasubbag Dokumentasi dan Informasi	Pengawas	9	3.360.146,26
	Bendahara Pembantu Pengeluaran	Pelaksana	7	1.560.456,02
	Analisis Peraturan Perundang-Undangan	Pelaksana	7	1.560.456,02
	Analisis Permasalahan Hukum	Pelaksana	7	1.560.456,02
	Pengadministrasi Umum	Pelaksana	5	1.414.533,24
	Pengadministrasi Data Peraturan Perundang-Undangan	Pelaksana	5	1.414.533,24
	Pengadministrasi Hukum	Pelaksana	5	1.414.533,24
	Pramu Bakti	Pelaksana	1	1.339.448,57
A.III. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				
	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Administrator	12	5.818.650,47
	Kasubbag Kesejahteraan Sosial	Pengawas	9	3.360.146,26
	Kasubbag Bina Mental Spiritual	Pengawas	8	2.734.468,99
	Kasubbag Kesejahteraan Masyarakat	Pengawas	8	2.734.468,99
	Bendahara Pembantu Pengeluaran	Pelaksana	7	1.560.456,02
	Bendahara Bansos	Pelaksana	7	1.560.456,02
	Pengadministrasi Umum	Pelaksana	5	1.414.533,24
A.IV. BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN, PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM				
	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Perekonomian dan SDA	Administrator	12	5.818.650,47
	Kasubbag Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan	Pengawas	9	3.360.146,26
	Kasubbag Pembinaan BUMD dan BLUD	Pengawas	8	2.734.468,99
	Kasubbag Sumberdaya Alam	Pengawas	8	2.734.468,99
	Analisis Kinerja investasi, Penerusan Pinjaman dan kredit program	Pelaksana	7	1.560.456,02
	Bendahara Pembantu Pengeluaran	Pelaksana	7	1.560.456,02
	Pengadministrasi Pengamanan dan perlindungan akses pasar	Pelaksana	5	1.414.533,24
	Pengadministrasi sarana dan pengembangan usaha	Pelaksana	5	1.414.533,24
	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	Pelaksana	5	1.414.533,24
	Pemantau Pelaksanaan rencana umum energi	Pelaksana	5	1.414.533,24
	Pramu Bakti	Pelaksana	1	1.339.448,57

NO.	Nama Jabatan	Jenis Jabatan	Kelas	BEBARAN TPP PER JABATAN/BULAN
A.V. BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA				
	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Administrator	12	5.818.650,47
	Kasubbag Pengelolaan Barang dan Jasa	Pengawas	9	3.360.146,26
	Kasubbag Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Pengawas	9	3.360.146,26
	Kasubbag Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pengawas	9	3.360.146,26
	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pelaksana	7	1.560.456,02
	Bendahara Pembantu Pengeluaran	Pelaksana	7	1.560.456,02
	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pelaksana	7	1.560.456,02
	Pengadministrasi Umum	Pelaksana	5	1.414.533,24
	Registrar	Pelaksana	5	1.414.533,24
	Pengadministrasi Layanan Pengadaan secara Elektronik	Pelaksana	5	1.414.533,24
A.VI. BAGIAN ORGANISASI				
	Kepala Bagian Organisasi	Administrator	12	5.818.650,47
	Kasubbag Kelembagaan dan Anjab	Pengawas	9	3.360.146,26
	Kasubbag Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Pengawas	9	3.360.146,26
	Kasubbag Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Pengawas	8	2.734.468,99
	Analisis Jabatan	Pelaksana	7	1.560.456,02
	Analisis Kelembagaan	Pelaksana	7	1.560.456,02
	Bendahara Pembantu Pengeluaran	Pelaksana	7	1.560.456,02
	analisis kinerja		7	1.560.456,02
	Pengadministrasi Umum	Pelaksana	5	1.414.533,24
A.VII. BAGIAN UMUM				
	Kepala Bagian Umum dan Protokol	Administrator	12	5.818.650,47
	Kasubbag Kepegawaian dan Keuangan	Pengawas	9	3.360.146,26
	Kasubbag Protokol Tata Usaha Pimpinan dan Staff Ahli	Pengawas	9	3.360.146,26
	Kasubbag Rumah Tangga dan Perlengkapan	Pengawas	9	3.360.146,26
	Bendahara	Pelaksana	7	1.560.456,02
	Analisis Protokol	Pelaksana	7	1.560.456,02
	Penata Kendaraan Dinas	Pelaksana	7	1.560.456,02
	Penyusun Program anggaran dan pelaporan	Pelaksana	7	1.560.456,02

NO.	Nama Jabatan	Jenis Jabatan	Kelas	BESARAN TPP PER JABATAN/BULAN
	Penyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah	Pelaksana	7	1.560.456,02
	Penyusun rencana Kebutuhan Barang Inventaris	Pelaksana	7	1.560.456,02
	Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana	Pelaksana	7	1.560.456,02
	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Pelaksana	6	1.466.938,51
	Pengelola Surat	Pelaksana	6	1.466.938,51
	Pengadministrasi Kepegawaian	Pelaksana	5	1.414.533,24
	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	Pelaksana	5	1.414.533,24
	Pengadministrasi Umum	Pelaksana	5	1.414.533,24
	Pengadministrasi Persuratan	Pelaksana	5	1.414.533,24
	Pengadministrasi Pemeliharaan Gedung Kantor	Pelaksana	5	1.414.533,24
	Pemelihara Peralatan	Pelaksana	5	1.414.533,24
	Pengemudi VIP	Pelaksana	5	1.414.533,24
	Registrar	Pelaksana	5	1.414.533,24
	Petugas Penggandaan	Pelaksana	5	1.414.533,24
	Pranata Jamuan	Pelaksana	5	1.414.533,24
	Pengemudi	Pelaksana	5	1.414.533,24
	Operator Mesin	Pelaksana	5	1.414.533,24
	Pemelihara Peralatan	Pelaksana	5	1.414.533,24
	Pramu Bakti	Pelaksana	1	1.339.448,57
B.	SEKRETARIAT DPRD			
	Sekretaris DPRD	Pimpinan Tinggi Pratama	14	7.375.345,37
	Kabag Umum dan Perlengkapan	Administrator	11	4.228.462,52
	Kabag Keuangan	Administrator	11	4.228.462,52
	Kabag Hukum dan Persidangan	Administrator	11	4.228.462,52
	Kasubag Tata Usaha, Kepegawaian dan Aset	Pengawas	9	3.121.898,06
	Kasubag Humas, Protokoler dan Rumah Tangga	Pengawas	9	3.121.898,06
	Kasubag Keuangan, akuntansi dan Verifikasi	Pengawas	9	3.121.898,06
	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Pengawas	9	3.121.898,06
	Kasubag Persidangan dan Risalah	Pengawas	9	3.121.898,06
	Kasubag Hukum dan Perundang-Undangan	Pengawas	9	3.121.898,06
	Bendahara	Pelaksana	7	1.560.456,02
	Penyusun Kebutuhan Barang inventaris	Pelaksana	7	1.560.456,02

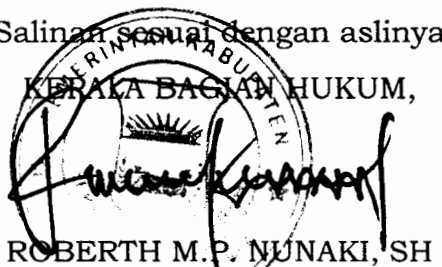
NO.	Nama Jabatan	Jenis Jabatan	Kelas	BESARAN TPP PER JABATAN/BULAN
	Penyusun Laporan Keuangan	Pelaksana	7	1.560.456,02
	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Pelaksana	7	1.560.456,02
	Penyusun Risalah	Pelaksana	7	1.560.456,02
	Penyusun Rancangan Perundang-Undangan	Pelaksana	7	1.560.456,02
	Analisis Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	Pelaksana	7	1.560.456,02
	Analisis Humas dan Protokol	Pelaksana	7	1.560.456,02
	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Pelaksana	6	1.466.938,51
	Pengelola Persediaan	Pelaksana	6	1.466.938,51
	Pengadministrasian Persuratan	Pelaksana	5	1.414.533,24
	Pengadministrasian umum	Pelaksana	5	1.414.533,24
	Pengadministrasian Keuangan	Pelaksana	5	1.414.533,24
	Pengadministrasian Risalah	Pelaksana	5	1.414.533,24
	Pengadministrasian Data Perundang-Undangan	Pelaksana	5	1.414.533,24
	Petugas Penggandaan	Pelaksana	5	1.414.533,24
	Ajudan	Pelaksana	5	1.414.533,24
	Pranata Jamuan	Pelaksana	5	1.414.533,24
	Pramu Bakti	Pelaksana	1	1.339.448,57

BUPATI TELUK WONDAMA,

CAP/TTD

HENDRIK S. MAMBOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KERALA BAGIAN HUKUM,


ROBERTH M.P. NUNAKI, SH
 NIP. 19760410 200312 1 007

Lampiran II : Peraturan Bupati Teluk Wondama
 Nomor : 11 Tahun 2023
 Tanggal : 19 Januari 2023

DAFTAR BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 BAGI APARATUR SIPIL NEGARA PADA DINAS DAERAH

Nama Jabatan	Jenis Jabatan	Kelas	Besaran Tpp Per Jabatan/Bulan
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana			
Kepala Dinas P3AP2KB	Pimpinan Tinggi Pratama	14	7.375.345,37
Sekretaris	Administrator	12	5.275.634,63
Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan Dan Kualitas Hidup Keluarga	Administrator	11	4.071.030,35
Kepala Bidang Data Dan Informasi Gender Dan Anak	Administrator	11	4.071.030,35
Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan Dan Pemenuhan Hak Anak	Administrator	11	4.071.030,35
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dan KB	Administrator	11	4.071.030,35
Kasubag Keuangan Dan Aset	Pengawas	9	3.121.898,06
Kasubag Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan	Pengawas	9	3.121.898,06
Kasubag Umum Dan Kepegawaian	Pengawas	8	2.511.064,63
Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Pendidikan Dan Pelatihan Organisasi Perempuan	Pengawas	8	2.511.064,63
Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi, Sosial Politik Dan Hukum	Pengawas	8	2.511.064,63
Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga	Pengawas	8	2.511.064,63
Kepala Seksi Data Dan Informasi Gender	Pengawas	8	2.511.064,63
Kepala Seksi Data Dan Informasi Anak	Pengawas	8	2.511.064,63
Kepala Seksi Sistem Data Dan Informasi	Pengawas	8	2.511.064,63
Kepala Seksi Perlindungan Perempuan	Pengawas	8	2.511.064,63
Kepala Seksi Perlindungan Khusus Anak	Pengawas	8	2.511.064,63
Kepala Seksi Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Anak Dan Perempuan	Pengawas	8	2.511.064,63
Kepala Seksi Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera	Pengawas	8	2.511.064,63
Kepala Seksi Pengendalian Penduduk Dan Informasi Keluarga	Pengawas	8	2.511.064,63

Nama Jabatan	Jenis Jabatan	Kelas	Besaran Tpp Per Jabatan/Bulan
Kepala Seksi Pendayagunaan Plkb Dan Kader KB	Pengawas	8	2.511.064,63
Bendahara	Pelaksana	7	1.560.456,02
Analisis Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan	Pelaksana	7	1.560.456,02
Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Pelaksana	6	1.466.938,51
Pengelola Penguatan Pengarusutamaan Gender	Pelaksana	6	1.466.938,51
Pengadministrasi Persuratan	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pengadministrasi Kepegawaian	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pengadministrasi Sarana Dan Prasarana	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pengadministrasi Perencanaan Dan Program	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pengadministrasi Pelatihan	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pengadministrasi Umum	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pengadministrasi Pelatihan	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pramu Bakti	Pelaksana	1	1.339.448,57
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan			
Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Pimpinan Tinggi Pratama	14	7.375.345,37
Sekretaris	Administrator	12	5.275.634,63
Kepala Bidang Objek Dan Sarana Wisata	Administrator	11	4.071.030,35
Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	Administrator	11	4.071.030,35
Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata	Administrator	11	4.071.030,35
Kepala Bidang Kebudayaan	Administrator	11	4.071.030,35
Kasubag Keuangan Dan Aset	Pengawas	9	3.121.898,06
Kasubag Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan	Pengawas	9	3.121.898,06
Kepala Seksi Usaha Pariwisata	Pengawas	9	3.121.898,06
Kepala Seksi Nilai Budaya	Pengawas	9	3.121.898,06
Kasubag Umum Dan Kepegawaian	Pengawas	8	2.511.064,63
Kepala Seksi Objek Wisata	Pengawas	8	2.511.064,63
Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana Wisata	Pengawas	8	2.511.064,63
Kepala Seksi Pengembangan Sarana Wisata	Pengawas	8	2.511.064,63
Kepala Seksi Produk Pariwisata	Pengawas	8	2.511.064,63
Kepala Seksi Pengelolaan Sumberdaya Pariwisata	Pengawas	8	2.511.064,63
Kepala Seksi Promosi Pariwisata	Pengawas	8	2.511.064,63
Kepala Seksi Sarana Promosi	Pengawas	8	2.511.064,63
Kepala Seksi Kemitraan Wisata	Pengawas	8	2.511.064,63
Kepala Seksi Kesenian	Pengawas	8	2.511.064,63
Kepala Seksi Sejarah Dan Purbakala	Pengawas	8	2.511.064,63

Nama Jabatan	Jenis Jabatan	Kelas	Besaran Tpp Per Jabatan/Bulan
Bendahara	Pelaksana	7	1.560.456,02
Analisis Pengembangan Sarana Dan Prasarana Pembelajaran	Pelaksana	7	1.560.456,02
Analisis Warisan Budaya	Pelaksana	7	1.560.456,02
Pengawas Kepariwisata	Pelaksana	7	1.560.456,02
Pengelola Kepegawaian	Pelaksana	6	1.466.938,51
Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Pelaksana	6	1.466.938,51
Pengelola Program Dan Laporan	Pelaksana	6	1.466.938,51
Pengelola Promosi Dan Informasi Pariwisata	Pelaksana	6	1.466.938,51
Pengadministrasi Umum	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pengadministrasi Persuratan	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pengadministrasi Kepegawaian	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pengadministrasi Sarana Dan Prasarana	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pengadministrasi Keuangan	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pengadministrasi Perencanaan Dan Program	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pengadministrasi Kesenian Dan Budaya Daerah	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pemelihara Peralatan	Pelaksana	5	1.414.533,24
Juru Pelestari Cagar Budaya	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pramu Kebersihan	Pelaksana	1	1.339.448,57
Pramu Bakti	Pelaksana	1	1.339.448,57
Dinas Lingkungan Hidup			
Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Pimpinan Tinggi Pratama	14	7.375.345,37
Sekretaris	Administrator	12	5.275.634,63
Kepala Bidang Pertanahan	Administrator	11	4.071.030,35
Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan	Administrator	11	4.071.030,35
Kepala Bidang Penataan Dan Penegakan Lingkungan Hidup	Administrator	11	4.071.030,35
Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 Dan Peningkatan Kapasitas	Administrator	11	4.071.030,35
Kasubag Umum Dan Kepegawaian	Pengawas	9	3.121.898,06
Kasubag Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan	Pengawas	9	3.121.898,06
Kasubag Keuangan Dan Aset	Pengawas	9	3.121.898,06
Kepala Seksi Pengukuran Dan Pemetaan	Pengawas	8	2.511.064,63
Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Tanah	Pengawas	8	2.511.064,63
Kepala Seksi Penataan Dan Pengendalian Tanah	Pengawas	8	2.511.064,63

Nama Jabatan	Jenis Jabatan	Kelas	Besaran Tpp Per Jabatan/Bulan
Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup	Pengawas	8	2.511.064,63
Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan	Pengawas	8	2.511.064,63
Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan	Pengawas	8	2.511.064,63
Kepala Seksi Perencanaan Dan Kajian Dampak Lingkungan	Pengawas	8	2.511.064,63
Kepala Seksi Layanan Pengaduan Dan Penyelesaian	Pengawas	8	2.511.064,63
Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan	Pengawas	8	2.511.064,63
Kepala Seksi Pengelolaan Limbah B3	Pengawas	8	2.511.064,63
Kepala Seksi Pengelolaan Sampah	Pengawas	8	2.511.064,63
Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Pengawas	8	2.511.064,63
Penyusun Kebutuhan Sarana Dan Prasarana	Pelaksana	7	1.560.456,02
Penyusun Rencana Dan Program	Pelaksana	7	1.560.456,02
Bendahara	Pelaksana	7	1.560.456,02
Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Pelaksana	6	1.466.938,51
Pengelola Keuangan	Pelaksana	6	1.466.938,51
Pengadministrasi Kepegawaian	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pengadministrasi Perencanaan Dan Program	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pengadministrasi Keuangan	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pengadministrasi Pertanahan	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pengadministrasi Persuratan	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pengadministrasi Umum	Pelaksana	5	1.414.533,24
Petugas Ukur	Pelaksana	5	1.414.533,24
Operator Alat Berat	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pramu Bakti	Pelaksana	1	1.339.448,57
Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat			
Kepala Dinas PUPR	Pimpinan Tinggi Pratama	14	7.375.345,37
Sekretaris	Administrator	12	5.275.634,63
Kepala Bidang Bina Marga	Administrator	11	4.071.030,35
Kepala Bidang Cipta Karya	Administrator	11	4.071.030,35
Kepala Bidang Perumahan Dan Permukiman	Administrator	11	4.071.030,35
Kepala Bidang Air Bersih Dan Penyehatan Lingkungan	Administrator	11	4.071.030,35
Kepala Bidang Sumber Daya Air	Administrator	11	4.071.030,35

Nama Jabatan	Jenis Jabatan	Kelas	Besaran Tpp Per Jabatan/Bulan
Kasubag Keuangan Dan Aset	Pengawas	9	3.121.898,06
Kasubag Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan	Pengawas	9	3.121.898,06
Kepala Seksi Pembangunan Dan Peningkatan Jalan	Pengawas	9	3.121.898,06
Kepala Seksi Pembangunan Jembatan	Pengawas	9	3.121.898,06
Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan	Pengawas	9	3.121.898,06
Kepala Seksi Pemanfaatan Tata Ruang	Pengawas	9	3.121.898,06
Kepala Seksi Tata Bangunan	Pengawas	9	3.121.898,06
Kepala Seksi Pemeliharaan Median Dan Taman Kota	Pengawas	9	3.121.898,06
Kepala Seksi Pembangunan Rumah Rakyat	Pengawas	9	3.121.898,06
Kepala Seksi Penataan Permukiman	Pengawas	9	3.121.898,06
Kepala Seksi Pembangunan Drainase Dan Jalan Lingkungan	Pengawas	9	3.121.898,06
Kepala Seksi Pembangunan Jaringan Air Bersih	Pengawas	9	3.121.898,06
Kepala Seksi Pemasangan Jaringan Rumah Tangga	Pengawas	9	3.121.898,06
Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan	Pengawas	9	3.121.898,06
Kepala Seksi Penataan Sungai Dan Pantai	Pengawas	9	3.121.898,06
Kepala Seksi Pengembangan Irigasi Dan Rawa	Pengawas	9	3.121.898,06
Kepala Seksi Pemeliharaan Irigasi Dan Sungai	Pengawas	9	3.121.898,06
Kasubag Umum Dan Kepegawaian	Pengawas	8	2.511.064,63
Bendahara Pengeluaran	Pelaksana	7	1.560.456,02
Penata Laporan Keuangan	Pelaksana	7	1.560.456,02
Analisa Program, Evaluasi Dan Pelaporan	Pelaksana	7	1.560.456,02
Analisis Sistem Jaringan Jalan Dan Jembatan	Pelaksana	7	1.560.456,02
Analisis Jalan Dan Jembatan	Pelaksana	7	1.560.456,02
Analisis Sumber Daya Air	Pelaksana	7	1.560.456,02
Analisis Sumber Daya Air	Pelaksana	7	1.560.456,02
Analisis Bangunan Dan Permukiman	Pelaksana	7	1.560.456,02
Analisis Pengembangan Sarana Dan Prasarana	Pelaksana	7	1.560.456,02
Analisis Perencanaan Wilayah Perumahan	Pelaksana	7	1.560.456,02
Penilik Jalan	Pelaksana	7	1.560.456,02
Penilik Jalan	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pengawas Jalan Dan Jembatan	Pelaksana	7	1.560.456,02
Pengawas Bangunan Gedung	Pelaksana	7	1.560.456,02
Pengawas Bangunan Dan Gedung	Pelaksana	7	1.560.456,02

Nama Jabatan	Jenis Jabatan	Kelas	Besaran Tpp Per Jabatan/Bulan
Pengawas Lapangan Petugas Pertamanan	Pelaksana	7	1.560.456,02
Pengawas Tata Bangunan Dan Permukiman	Pelaksana	7	1.560.456,02
Pengawas Fisik Permukiman	Pelaksana	7	1.560.456,02
Juru Survey Permukiman Perumahan	Pelaksana	7	1.560.456,02
Penelaah Penyehatan Lingkungan Permukiman	Pelaksana	7	1.560.456,02
Penata Penyehatan Lingkungan Perumahan	Pelaksana	7	1.560.456,02
Pengawas Irigasi	Pelaksana	7	1.560.456,02
Pengamatan Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	Pelaksana	7	1.560.456,02
Pengelola Kepegawaian	Pelaksana	6	1.466.938,51
Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Pelaksana	6	1.466.938,51
Pengelola Tata Ruang	Pelaksana	6	1.466.938,51
Pengelola Sumber Air Bersih	Pelaksana	6	1.466.938,51
Pengadministrasi Kepegawaian	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pengadministrasi Umum	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pengadministrasi Keuangan	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pengadministrasi Perencanaan Program	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pengadministrasi Gedung Dan Tata Bangunan	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pemelihara Sarana Dan Prasarana	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pemelihara Peralatan Kantor	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pemelihara Jalan	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pemelihara Alat	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pemelihara Sarana Dan Prasarana	Pelaksana	5	1.414.533,24
Oprator Alat Berat	Pelaksana	5	1.414.533,24
Teknisi Survey Jaringan Prasarana Dan Pelayanan	Pelaksana	7	1.560.456,02
Teknisi Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana	Pelaksana	5	1.414.533,24
Teknisi Rancang Bangunan	Pelaksana	5	1.414.533,24
Teknisi Sarana Dan Prasarana	Pelaksana	5	1.414.533,24
Teknisi Pemetaan Dan Penggambaran	Pelaksana	5	1.414.533,24
Teknisi Sarana Dan Prasarana	Pelaksana	5	1.414.533,24
Petugas Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	Pelaksana	5	1.414.533,24
Petugas Ukur	Pelaksana	3	1.349.061,65
Pramu Bakti	Pelaksana	1	1.339.448,57
Dinas Pertanian Dan Pangan			
Kepala Dinas Pertanian Dan Pangan	Pimpinan Tinggi Pratama	14	7.375.345,37
Sekretaris	Administrator	12	5.275.634,63

Nama Jabatan	Jenis Jabatan	Kelas	Besaran Tpp Per Jabatan/Bulan
Kepala Bidang Hortilkultura	Administrator	11	4.071.030,35
Kepala Bidang Peternakan	Administrator	11	4.071.030,35
Kepala Bidang Tanaman Pangan	Administrator	11	4.071.030,35
Kepala Bidang Ketahanan Pangan	Administrator	11	4.071.030,35
Kepala Bidang Perkebunan	Administrator	11	4.071.030,35
Kepala Bidang Penyuluhan	Administrator	11	4.071.030,35
Kasubag Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan	Pengawas	9	3.121.898,06
Kasubag Keuangan Dan Aset	Pengawas	9	3.121.898,06
Kasubag Umum Dan Kepegawaian	Pengawas	9	3.121.898,06
Kepala Seksi Produksi Holtikulutra	Pengawas	9	3.121.898,06
Kepala Seksi Pembenuhan Dan Perlindungan Tanaman	Pengawas	9	3.121.898,06
Kepala Seksi Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Horikultura	Pengawas	9	3.121.898,06
Kepala Seksi Produksi Dan Usaha Peternakan	Pengawas	9	3.121.898,06
Kepala Seksi Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat	Pengawas	9	3.121.898,06
Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan	Pengawas	9	3.121.898,06
Kepala Seksi Perbenihan Dan Perlindungan Tanaman	Pengawas	9	3.121.898,06
Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana Tanaman Pangan	Pengawas	9	3.121.898,06
Kepala Seksi Distribusi Dan Cadangan Pangan	Pengawas	9	3.121.898,06
Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi Dan Keamanan	Pengawas	9	3.121.898,06
Kepala Seksi Ketersediaan Dan Kerawanan Pangan	Pengawas	9	3.121.898,06
Kepala Seksi Produksi Perkebunan	Pengawas	9	3.121.898,06
Kepala Seksi Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Pengawas	9	3.121.898,06
Kepala Seksi Penyelenggaraan Penyuluhan	Pengawas	9	3.121.898,06
Kepala Seksi Pemberdayaan Sdm Dan Kelembagaan	Pengawas	9	3.121.898,06
Kepala Seksi Penyebaran Dan Pengembangan Ternak	Pengawas	8	2.511.064,63
Kepala Seksi Perbenihan Dan Perlindungan Tanaman	Pengawas	8	2.511.064,63
Kepala Seksi Pengembangan Sdm Dan Kelembagaan Petani	Pengawas	8	2.511.064,63
Bendahara Pengeluaran	Pelaksana	7	1.560.456,02
Penyuluh Pertanian Muda Wilayah I	Fungsional	9	2.724.817,73

Nama Jabatan	Jenis Jabatan	Kelas	Besaran Tpp Per Jabatan/Bulan
Penyuluh Pertanian Muda Wilayah Iii	Fungsional	9	2.843.941,83
Penyuluh Pertanian Pertama Wilayah I	Fungsional	8	2.191.915,56
Penyuluh Pertanian Pertama Wilayah II	Fungsional	8	2.223.830,47
Penyuluh Pertanian Pertama Wilayah III	Fungsional	8	2.287.660,28
Penyusun Program Anggaran Dan Pelaporan	Pelaksana	7	1.560.456,02
Penyusun Rencana Bahan Teknis Perbenihan	Pelaksana	7	1.560.456,02
Analisis Perencanaan Evaluasi Dan Pelaporan	Pelaksana	7	1.560.456,02
Analisis Materi Penyuluhan	Pelaksana	7	1.560.456,02
Analisis Kinerja	Pelaksana	7	1.560.456,02
Analisis Pangan	Pelaksana	7	1.560.456,02
Analisis Informasi Pasar Hasil Pertanian	Pelaksana	7	1.560.456,02
Analisis Pemasaran Hasil Pertanian	Pelaksana	7	1.560.456,02
Analisis Pengolah Hasil Pertanian	Pelaksana	7	1.560.456,02
Analisis Tanah Pertanian Pangan Berkelanjutan	Pelaksana	7	1.560.456,02
Pengawas Penyakit Dan Pengendali Penyakit Hewan	Pelaksana	7	1.560.456,02
Pengawas Pupuk Dan Pestisida	Pelaksana	7	1.560.456,02
Pemeriksa Alat Dan Mesin Pertanian	Pelaksana	7	1.560.456,02
Pengawas Harga Pangan	Pelaksana	7	1.560.456,02
Penyusun Rencana Bahan Teknis Perkebunan	Pelaksana	7	1.560.456,02
Penata Dokumen Hasil Produksi	Pelaksana	7	1.560.456,02
Penyuluh Pangan	Pelaksana	7	1.560.456,02
Penyuluh Perkebunan	Pelaksana	7	1.560.456,02
Penyuluh Pertanian	Pelaksana	7	1.982.544,77
Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan Wilayah II	Fungsional	7	2.010.684,02
Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan Wilayah III	Fungsional	7	2.038.823,27
Penyuluh Pertanian Pelaksana Wilayah I	Fungsional	6	1.442.485,82
Penyuluh Pertanian Pelaksana Wilayah II	Fungsional	6	1.466.938,51
Penyuluh Pertanian Pelaksana Wilayah III	Fungsional	6	1.564.749,23
Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Pelaksana	6	1.466.938,51
Pengelola Teknologi Perbenihan	Pelaksana	6	1.466.938,51
Pengelola Peternakan	Pelaksana	6	1.466.938,51
Pengolah Data	Pelaksana	6	1.466.938,51
Pengadministrasi Keuangan	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pengadministrasi Kepegawaian	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pengadministrasi Umum	Pelaksana	5	1.414.533,24

Nama Jabatan	Jenis Jabatan	Kelas	Besaran Tpp Per Jabatan/Bulan
Pengadministrasi Sertifikasi Perlindungan Varietas	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pengadministrasi Pelatihan	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pengadministrasi Koleksi Tumbuhan	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pengadministrasi Sertifikasi Perlindungan Varietas	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pengadministrasi Sarana Dan Prasarana	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pengadministrasi Peralatan Kantor	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pengadministrasi Pelatihan	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pengadministrasi Kerjasama Belajar	Pelaksana	5	1.414.533,24
Teknisi Instalasi Budidaya	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pemelihara Peralatan	Pelaksana	5	1.414.533,24
Perawat Ternak	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pemelihara Peralatan	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pramu Kebersihan	Pelaksana	1	1.339.448,57
Pramu Bakti	Pelaksana	1	1.339.448,57
Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil			
Kepala Dinas Kependudukan Dan CaPIL	Pimpinan Tinggi Pratama	14	7.375.345,37
Sekretaris	Administrator	12	5.275.634,63
Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Administrator	11	4.071.030,35
Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Administrator	11	4.071.030,35
Kepala Bidang Piak	Administrator	11	4.071.030,35
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Aset, Evaluasi Dan Pelaporan	Pengawas	9	3.121.898,06
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Pengawas	8	2.511.064,63
Kepala Seksi Kelahiran	Pengawas	8	2.511.064,63
Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk	Pengawas	8	2.511.064,63
Kepala Seksi Perkawinan Dan Perceraian	Pengawas	8	2.511.064,63
Kepala Seksi Perubahan Status Anak, Perwarganegaraan Dan Kematian	Pengawas	8	2.511.064,63
Kepala Seksi Informasi Administrasi Kependudukan	Pengawas	9	3.121.898,06
Kepala Seksi Pendataan Penduduk	Pengawas	8	2.511.064,63
Kepala Seksi Identitas Penduduk	Pengawas	9	3.121.898,06
Kepala Seksi Kerja Sama Dan Inovasi	Pengawas	8	2.511.064,63
Kepala Seksi Pengolahan Dan Penyajian Data	Pengawas	8	2.511.064,63
Bendahara	Pelaksana	7	1.560.456,02
Analisis Perencanaan Dan Program	Pelaksana	7	1.560.456,02
Penyusun Pencatatan Dan Pelaporan Data Kependudukan	Pelaksana	7	1.560.456,02

Nama Jabatan	Jenis Jabatan	Kelas	Besaran Tpp Per Jabatan/Bulan
Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Pelaksana	6	1.466.938,51
Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Pelaksana	6	1.466.938,51
Pengelola Sistem Informasi Kependudukan	Pelaksana	6	1.466.938,51
Pengadministrasi Keuangan	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pengadministrasi Kepegawaian	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pengadministrasi Kependudukan	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pengadministrasi Umum	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pengadministrasi Izin Kawin Dan Izin Cerai	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pramu Bakti	Pelaksana	1	1.339.448,57
Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga			
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga	Pimpinan Tinggi Pratama	14	7.375.345,37
Sekretaris	Administrator	12	5.275.634,63
Kepala Bidang Pendidikan Dasar	Administrator	11	4.071.030,35
Kepala Bidang Pendidikan Non Formasl Dan Informasl (Pnfi)	Administrator	11	4.071.030,35
Kepala Bidang Pemuda Dan Olah Raga	Administrator	11	4.071.030,35
Pengawas Madya	Fungsional	11	3.231.392,11
Guru Madya Wilayah I	Fungsional	11	3.231.392,11
Guru Madya Wilayah I (Sertifikasi)	Fungsional	11	1.604.593,02
Guru Madya Wilayah Ii	Fungsional	11	3.336.346,89
Guru Madya Wilayah Ii (Sertifikasi)	Fungsional	11	1.762.025,19
Guru Madya Wilayah Iii	Fungsional	11	3.493.779,06
Guru Madya Wilayah Iii (Sertifikasi)	Fungsional	11	1.866.979,97
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Aset Program Dan Pelaporan	Pengawas	9	3.121.898,06
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Pengawas	9	3.121.898,06
Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana Bidang Pendas	Pengawas	9	3.121.898,06
Kepala Seksi Paud	Pengawas	9	3.121.898,06
Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana	Pengawas	9	3.121.898,06
Kepala Seksi Pelatihan Dan Pengembangan	Pengawas	9	3.121.898,06
Kepala Seksi Pendidikan Dan Olahraga Kepemudaan	Pengawas	9	3.121.898,06
Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana	Pengawas	9	3.121.898,06
Pamong Belajar Muda	Fungsional	9	2.446.861,50
Pengawas Muda	Fungsional	9	2.446.861,50
Guru Muda Wilayah I	Fungsional	9	2.446.861,50
Guru Muda Wilayah I (Sertifikasi)	Fungsional	9	1.255.620,50
Guru Muda Wilayah II	Fungsional	9	2.565.985,59
Guru Muda Wilayah II (Sertifikasi)	Fungsional	9	1.295.328,53

Nama Jabatan	Jenis Jabatan	Kelas	Besaran Tpp Per Jabatan/Bulan
Guru Muda Wilayah III	Fungsional	9	2.843.941,83
Guru Muda Wilayah III (Sertifikasi)	Fungsional	9	1.454.160,66
Kepala Seksi Kurikulum	Pengawas	8	2.511.064,63
Kepala Seksi Tenaga Pendidik Dan Kependidikan	Pengawas	8	2.511.064,63
Pamong Belajara Pertama	Fungsional	8	2.000.426,11
Pengawas Pertama	Fungsional	8	2.000.426,11
Guru Pertama Wilayah I	Fungsional	8	2.000.426,11
Guru Pertama Wilayah I (Sertifikasi)	Fungsional	8	1.074.893,80
Guru Pertama Wilayah II	Fungsional	8	2.032.341,02
Guru Pertama Wilayah III (Sertifikat)	Fungsional	8	1.042.978,89
Guru Pertama Wilayah III	Fungsional	8	2.287.660,28
Bendahara	Pelaksana	7	1.560.456,02
Analisis Kepegawaian	Pelaksana	7	1.560.456,02
Analisis Pengembangan Sarana Dan Prasarana Pembelajaran	Pelaksana	7	1.560.456,02
Penyusun Program Fasilitas Pendidikan	Pelaksana	7	1.560.456,02
Analisis Pengembangan Paud	Pelaksana	7	1.560.456,02
Perancang Sarana Dan Prasarana	Pelaksana	7	1.560.456,02
Penyuluh Olah Raga	Pelaksana	7	1.560.456,02
Analisis Sarana Pembinaan Pendidikan Masyarakat	Pelaksana	7	1.560.456,02
Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Pelaksana	6	1.466.938,51
Pengelola Kurikulum Peningkatan Sekolah	Pelaksana	6	1.466.938,51
Pengelola Pendidikan	Pelaksana	6	1.466.938,51
Pengadministrasi Perencanaan Dan Program	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pengadministrasi Akses Iptek	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pengadministrasi Keuangan	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pengadministrasi Umum	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pengadministrasi Kepegawaian	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pengadministrasi Kesiswaan	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pengadministrasi Kurikulum	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pengadministrasi Sarana Dan Prasarana	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pengadministrasi Kependidikan	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pengadministrasi Pelatihan	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pengawas Olahraga	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pemelihara Peralatan	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pemelihara Sarana Dan Prasarana	Pelaksana	5	1.414.533,24
Petugas Keamanan	Pelaksana	3	1.349.061,65
Pramu Bakti	Pelaksana	1	1.339.448,57
Pramu Kebersihan	Pelaksana	1	1.339.448,57

Nama Jabatan	Jenis Jabatan	Kelas	Beberapa Tpp Per Jabatan/Bulan
Dinas Kesehatan			
Kepala Dinas Kesehatan	Pimpinan Tinggi Pratama	14	7.375.345,37
Sekretaris	Administrator	12	5.275.634,63
Kepala Bidang Kesehatan Dan Sumber Daya Kesehatan	Administrator	11	4.071.030,35
Kepala Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	Administrator	11	4.071.030,35
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Administrator	11	4.071.030,35
Kasubag Umum Dan Kepegawaian	Pengawas	9	3.121.898,06
Kasubag Perencanaan, Aset, Keuangan, Evaluasi Dan Pelaporan	Pengawas	9	3.121.898,06
Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan	Pengawas	8	2.511.064,63
Kepala Seksi Promosi Dan Pemberdayaan Masyarakat	Pengawas	9	3.121.898,06
Kepala Seksi Kesehatan Sumber Daya Manusia	Pengawas	8	2.511.064,63
Kepala Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	Pengawas	9	3.121.898,06
Kepala Seksi Kesehatan Keluarga Dan Gizi Masyarakat	Pengawas	9	3.121.898,06
Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja Dan Olahraga	Pengawas	8	2.511.064,63
Kepala Seksi Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Dan Kesehatan Jiwa	Pengawas	8	2.511.064,63
Kepala Seksi Surveilans Dan Imunisasi	Pengawas	8	2.511.064,63
Kepala Seksi Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Menular	Pengawas	9	3.121.898,06
Bendahara		7	1.560.456,02
Bendahara Pengeluaran	Pelaksana	7	1.560.456,02
Analisis Kesehatan Ibu Dan Anak	Pelaksana	7	1.560.456,02
Analisis Jabatan	Pelaksana	7	1.560.456,02
Analisis Obat Dan Makanan	Pelaksana	7	1.560.456,02
Analisis Penyakit Menular	Pelaksana	7	1.560.456,02
Penyusun Laporan Keuangan	Pelaksana	7	1.560.456,02
Penyusun Program Anggaran Dan Pelaporan		7	1.560.456,02
Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	Pelaksana	7	1.560.456,02
Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Pelaksana	6	1.466.938,51
Pengelola Pelayanan Kesehatan	Pelaksana	6	1.466.938,51
Pengelola Barang Persediaan	Pelaksana	6	1.466.938,51
Pengelola Kefarmasian	Pelaksana	6	1.466.938,51

Nama Jabatan	Jenis Jabatan	Kelas	Besaran Tpp Per Jabatan/Bulan
Pengelola Program Kesehatan Keluarga	Pelaksana	6	1.466.938,51
Pengelola Data	Pelaksana	6	1.466.938,51
Pengelola Kefarmasian		7	2.629.747,53
Dokter Madya Wilayah I		12	16.950.475,17
Dokter Pertama Wilayah I	Fungsional	9	15.749.052,63
Dokter Pertama Wilayah II	Fungsional	9	16.146.132,96
Dokter Pertama Wilayah III	Fungsional	9	16.543.213,29
Dokter Muda Wilayah I		10	15.814.893,30
Dokter Muda Wilayah II		10	16.271.365,99
Dokter Muda Wilayah III		10	16.636.544,14
Dokter Gigi Pertama Wilayah I	Fungsional	9	15.749.052,63
Penyuluh Kesehatan Madya Wilayah I		11	4.333.417,30
Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya Wilayah II		11	4.543.326,87
Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya Wilayah III		11	4.910.668,60
Penyuluh Kesehatan Dan Pencegahan Penyakit Wilayah I		8	2.734.468,99
Penyuluh Kesehatan Dan Pencegahan Penyakit Menular Wilayah III		8	3.340.852,23
Penyuluh Kesehatan Dan Pencegahan Penyakit	Pelaksana	7	1.560.456,02
Perawat Muda Wilayah III	Fungsional	9	3.399.854,29
Perawat Penyelia Wilayah I		8	2.734.468,99
Perawat Penyelia Wilayah II		8	3.021.703,15
Perawat Penyelia Wilayah III		8	3.340.852,23
Perawat Pertama Wilayah I		8	2.734.468,99
Perawat Pertama Wilayah III		8	3.340.852,23
Perawat Pelaksana Lanjutan Wilayah I		7	2.629.747,53
Perawat Pelaksana Lanjutan Wilayah III		7	3.164.393,29
Perawat Pelaksana Wilayah I		6	2.176.066,28
Perawat Pelaksana Wilayah II		6	2.445.045,79
Perawat Pelaksana Wilayah III		6	2.762.930,65
Perawat Pelaksana Pemula Wilayah III		5	2.699.279,01
Perawat Gigi Penyelia Wilayah I		8	2.734.468,99
Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan Wilayah I		7	2.629.747,53
Bidan Penyelia Wilayah I		8	2.734.468,99
Bidan Penyelia Wilayah II		8	3.021.703,15
Bidan Pertama Wilayah I		8	2.734.468,99
Bidan Pelaksana Lanjutan Wilayah I		7	2.629.747,53
Bidan Pelaksana Lanjutan Wilayah II		7	2.883.000,79
Bidan Pelaksana Lanjutan Wilayah III		7	3.164.393,29
Bidan Pelaksana Wilayah I		6	2.176.066,28
Bidan Pelaksana Wilayah II		6	2.445.045,79

Nama Jabatan	Jenis Jabatan	Kelas	Besaran Tpp Per Jabatan/Bulan
Bidan Pelaksana Wilayah III		6	2.762.930,65
Apoteker Pertama Wilayah II		8	3.181.277,69
Apoteker Ahli Pertama Wilayah I		8	2.957.873,34
Asisten Apoteker Terampil Wilayah II		6	2.445.045,79
Nutrisionis Madya Wilayah I		11	4.333.417,30
Nutrisionis Penyelia Wilayah I		8	2.734.468,99
Nutrisionis Penyelia Wilayah III		8	3.340.852,23
Nutrisionis Terampil Wilayah I		6	2.176.066,28
Nutrisionis Pelaksana Lanjutan Wilayah II		7	2.883.000,79
Nutrisionis Pelaksana Wilayah III		6	2.762.930,65
Nutrisionis Terampil Wilayah II		6	2.445.045,79
Sanitarian Muda Wilayah I	Fungsional	9	3.002.773,96
Sanitarian Mahir/Penyelia Wilayah I		8	2.734.468,99
Sanitarian Pertama Wilayah I		8	2.734.468,99
Sanitarian Penyelia Wilayah II		8	3.021.703,15
Fisioterapis Penyelia Wilayah I		8	2.734.468,99
Pranata Laboratorium Penyelia Wilayah I		8	2.734.468,99
Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Wilayah I		6	2.176.066,28
Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil Wilayah II		6	2.445.045,79
Sanitarian Pelaksana Wilayah III		6	2.762.930,65
Pengadministrasi Umum	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pengadministrasi Keuangan	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pengadministrasi Kepegawaian	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pengadministrasi Persuratan	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pemelihara Peralatan	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pramu Kebersihan	Pelaksana	1	1.339.448,57
Pramu Bakti	Pelaksana	1	1.339.448,57
Dinas Transmigrasi			
Kepala Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	Pimpinan Tinggi Pratama	14	7.375.345,37
Sekretaris	Administrator	12	5.275.634,63
Kepala Bidang Penyiapan Kawasan Dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi	Administrator	11	4.071.030,35
Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Administrator	11	4.071.030,35
Kepala Bidang Ketenagakerjaan	Administrator	11	4.071.030,35
Kasubag Umum Dan Kepegawaian	Pengawas	9	3.121.898,06
Kasubag Perencanaan, Keuangan, Aset, Evaluasi Dan Pelaporan	Pengawas	9	3.121.898,06
Kepala Seksi Penyiapan Area	Pengawas	9	3.121.898,06
Kepala Seksi Hubungan Industri Dan Syarat-Syarat Kerja	Pengawas	9	3.121.898,06

Nama Jabatan	Jenis Jabatan	Kelas	Besaran Tpp Per Jabatan/Bulan
Kepala Seksi Perumahan Dan Pemukiman Transmigrasi	Pengawas	8	2.511.064,63
Kepala Seksi Pendaftaran Seleksi Dan Penempatan Transmigrasi	Pengawas	8	2.511.064,63
Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana Transmigrasi	Pengawas	8	2.511.064,63
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi	Pengawas	8	2.511.064,63
Kepala Seksi Pembinaan Usaha Ekonomi Dan Sosial Budaya	Pengawas	8	2.511.064,63
Kepala Seksi Pelatihan Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pengawas	8	2.511.064,63
Bendahara	Pelaksana	7	1.560.456,02
Pemeriksa Ketransmigrasian	Pelaksana	7	1.560.456,02
Analisis Jabatan	Pelaksana	7	1.560.456,02
Analisis Pengembangan Sarana Dan Prasarana	Pelaksana	7	1.560.456,02
Analisis Tenaga Kerja	Pelaksana	7	1.560.456,02
Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Pelaksana	6	1.466.938,51
Pengadministrasi Umum	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pengadministrasi Pelatihan	Pelaksana	5	1.414.533,24
Petugas Penggandaan	Pelaksana	5	1.414.533,24
Petugas Ukur	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pemelihara Bangunan	Pelaksana	5	1.414.533,24
Registrar	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pramu Kebersihan	Pelaksana	1	1.339.448,57
Dinas Perikanan			
Kepala Dinas Perikanan	Pimpinan Tinggi Pratama	14	7.375.345,37
Sekretaris	Administrator	12	5.275.634,63
Kepala Bidang Bina Usaha Kecil	Administrator	11	4.071.030,35
Kepala Bidang Perikanan	Administrator	11	4.071.030,35
Kepala Bidang Produksi	Administrator	11	4.071.030,35
Kasubag Keuangan, Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan	Pengawas	9	3.121.898,06
Kasubag Umum Dan Kepegawaian	Pengawas	8	2.511.064,63
Kepala Seksi Perikanan Tangkap	Pengawas	9	3.121.898,06
Kepala Seksi Perikanan Budidaya	Pengawas	9	3.121.898,06
Kepala Seksi Diklat Dan Pendampingan	Pengawas	8	2.511.064,63
Kepala Seksi Ilmu Pengetahuan Teknologi Dan Informasi	Pengawas	8	2.511.064,63
Kepala Seksi Kelembagaan Nelayan Dan Pembudidaya Ikan	Pengawas	8	2.511.064,63

Nama Jabatan	Jenis Jabatan	Kelas	Besaran Tpp Per Jabatan/Bulan
Kepala Seksi Pengolahan Hasil Perikanan	Pengawas	8	2.511.064,63
Kepala Seksi Pakan Dan Obat Ikan	Pengawas	8	2.511.064,63
Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana	Pengawas	8	2.511.064,63
Kepala Seksi Pembenihan Dan Pembesaran	Pengawas	8	2.511.064,63
Penyusun Program Anggaran Dan Pelaporan	Pelaksana	7	1.560.456,02
Bendahara	Pelaksana	7	1.560.456,02
Analisis Mutu Hasil Perikanan	Pelaksana	7	1.560.456,02
Penyusun Rencana Perancangan Konservasi Jenis Ikan	Pelaksana	7	1.560.456,02
Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Pelaksana	6	1.466.938,51
Pengelola Jasa Pangkalan Pendaratan Ikan	Pelaksana	6	1.466.938,51
Pengelola Pengawasan Pembudidayaan Ikan	Pelaksana	6	1.466.938,51
Pengelola Pemantauan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Pelaksana	6	1.466.938,51
Pengelola Pengawasan Pembudidayaan Ikan	Pelaksana	6	1.466.938,51
Pengadministrasi Persuratan	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pengadministrasi Umum	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pengadministrasi Sarana Dan Prasarana	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pengadministrasi Perencanaan Dan Program	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pengadministrasi Keuangan	Pelaksana	5	1.414.533,24
Teknisi Mesin	Pelaksana	5	1.414.533,24
Teknisi Budidaya Perikanan	Pelaksana	5	1.414.533,24
Teknisi Mesin	Pelaksana	5	1.414.533,24
Teknisi Konservasi Kelautan Perikanan	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pramu Benih Ikan	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pramu Bakti	Pelaksana	1	1.339.448,57
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah			
Kepala Dinas Perindakop dan UKM	Pimpinan Tinggi Pratama	14	7.375.345,37
Sekretaris	Administrator	12	5.275.634,63
Kepala Bidang Perindustrian	Administrator	11	4.071.030,35
Kepala Bidang Perdagangan	Administrator	11	4.071.030,35
Kepala Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Administrator	11	4.071.030,35
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Aset, Evaluasi Dan Pelaporan	Pengawas	9	3.121.898,06
Kepala Seksi Usaha Dan Bimbingan Produksi	Pengawas	9	3.121.898,06

Nama Jabatan	Jenis Jabatan	Kelas	Besaran Tpp Per Jabatan/Bulan
Kepala Seksi Pembinaan Dan Pengawasan Usaha Industri	Pengawas	9	3.121.898,06
Kepala Seksi Pembinaan Dan Pengawasan Usaha Perdagangan	Pengawas	9	3.121.898,06
Kepala Seksi Usaha Sarana Perdagangan, Metrologi Dan Perlindungan	Pengawas	9	3.121.898,06
Kepala Seksi Kelembagaan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Pengawas	9	3.121.898,06
Kepala Seksi Bina Usaha Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Pengawas	9	3.121.898,06
Kepala Seksi Fasilitas Pembiayaan Dan Simpan Pinjam	Pengawas	9	3.121.898,06
Kasubag Umum Dan Kepegawaian	Pengawas	8	2.511.064,63
Kepala Seksi Industri Kecil Menengah Dan Rumah Tangga	Pengawas	8	2.511.064,63
Kepala Seksi Informasi Pasar Dan Distribusi	Pengawas	8	2.511.064,63
Penyusun Program Anggaran Dan Pelaporan	Pelaksana	7	1.560.456,02
Bendahara Pengeluaran	Pelaksana	7	1.560.456,02
Analisis Perdagangan	Pelaksana	7	1.560.456,02
Analisis Data Dan Informasi	Pelaksana	7	1.560.456,02
Analisis Koperasi	Pelaksana	7	1.560.456,02
Penyusun Rencana Bimbingan Teknis Usaha	Pelaksana	7	1.560.456,02
Penyusun Rencana Sarana Pengembangan Usaha	Pelaksana	7	1.560.456,02
Penyusun Rencana Pengawasan	Pelaksana	7	1.560.456,02
Pengelola Kepegawaian	Pelaksana	6	1.466.938,51
Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Pelaksana	6	1.466.938,51
Pengelola Data	Pelaksana	6	1.466.938,51
Pengadministrasian Kepegawaian	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pengadministrasian Umum	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pengadministrasian Perencanaan Dan Program	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pengadministrasian Persuratan	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pengadministrasian Pelatihan	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pengadministrasian Pengamanan Dan Perlindungan Akses Pasar	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pengadministrasian Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pengadministrasian Sarana Pengembangan Usaha	Pelaksana	5	1.414.533,24

Nama Jabatan	Jenis Jabatan	Kelas	Bebaran Tpp Per Jabatan/Bulan
Pengadministrasi Akses Permodalan	Pelaksana	5	1.414.533,24
Teknisi Listrik Dan Jaringan	Pelaksana	5	1.414.533,24
Petugas Keamanan	Pelaksana	3	1.349.061,65
Pramu Bakti	Pelaksana	1	1.339.448,57
Pramu Kebersihan	Pelaksana	1	1.339.448,57
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan			
Kepala Dinas Perpustakaan Dan Arsip	Pimpinan Tinggi Pratama	14	7.375.345,37
Sekretaris	Administrator	12	5.275.634,63
Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan	Administrator	11	4.071.030,35
Kepala Bidang Kearsipan	Administrator	11	4.071.030,35
Kepala Bidang Layanan Perpustakaan	Administrator	11	4.071.030,35
Kasubag Perencanaan, Keuangan, Aset, Evaluasi Dan Pelaporan	Pengawas	9	3.121.898,06
Kasubag Umum Dan Kepegawaian	Pengawas	8	2.511.064,63
Kepala Seksi Pengadaan Dan Pengembangan Sdm	Pengawas	8	2.511.064,63
Kepala Seksi Pengelolaan Konservasi, Fumigasi Dan Bahan Pustaka	Pengawas	8	2.511.064,63
Kepala Seksi Teknologi Informasi Dan Alih Media Perpustakaan	Pengawas	8	2.511.064,63
Kepala Seksi Pengumpulan Dan Pengelolaan Arsip	Pengawas	8	2.511.064,63
Kepala Seksi Penyiapan Dan Pelayanan Arsip	Pengawas	8	2.511.064,63
Kepala Seksi Pemeliharaan Dan Pemusnahan Arsip	Pengawas	8	2.511.064,63
Kepala Seksi Penataan Perpustakaan	Pengawas	8	2.511.064,63
Kepala Seksi Pelayanan Perpustakaan	Pengawas	8	2.511.064,63
Kepala Seksi Pelayanan Perpustakaan Keliling	Pengawas	8	2.511.064,63
Bendahara	Pelaksana	7	1.560.456,02
Analisis Perencanaan Evaluasi Dan Pelaporan	Pelaksana	7	1.560.456,02
Pengelola Kepegawaian	Pelaksana	6	1.466.938,51
Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Pelaksana	6	1.466.938,51
Pengelola Data	Pelaksana	6	1.466.938,51
Pengelola Bahan Pustaka	Pelaksana	6	1.466.938,51
Pengelola Perpustakaan	Pelaksana	6	1.466.938,51
Pengadministrasi Perpustakaan	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pengadministrasi Umum	Pelaksana	5	1.414.533,24
Registrar	Pelaksana	5	1.414.533,24

Nama Jabatan	Jenis Jabatan	Kelas	Besaran Tpp Per Jabatan/Bulan
Pemelihara Sarana Dan Prasarana	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pramu Kebersihan	Pelaksana	1	1.339.448,57
Dinas Sosial			
Kepala Dinas Sosial	Pimpinan Tinggi Pratama	14	7.375.345,37
Sekretaris	Administrator	12	5.275.634,63
Kepala Bidang Dayasos	Administrator	11	4.071.030,35
Kepala Bidang Linjamsos	Administrator	11	4.071.030,35
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	Administrator	11	4.071.030,35
Kasubag Keuangan, Evaluasi, Program Dan Pelaporan	Pengawas	9	3.121.898,06
Kepala Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin Dan Penerbitan Ijin Sumbangan	Pengawas	9	3.121.898,06
Kepala Seksi Kat	Pengawas	9	3.121.898,06
Kepala Seksi Rehap Tuna Sosial Penyalahgunaan Napza Dan Pelayanan Sosial Anak	Pengawas	9	3.121.898,06
Kasubag Umum Dan Kepegawaian	Pengawas	8	2.511.064,63
Kepala Seksi Pengembangan Kelembagaan Sosial Dan Kepahlawanan, Keperintisan Dan Kesetiakawanan	Pengawas	8	2.511.064,63
Kepala Seksi Bantuan Sarana Dan Prasarana Keagamaan	Pengawas	8	2.511.064,63
Kepala Seksi Bansos Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Dan Bencana Sosial	Pengawas	8	2.511.064,63
Kepala Seksi Jamsos Pds, Tpk Pekerja Migran Sosial	Pengawas	8	2.511.064,63
Kepala Seksi Rehabilitasi Dan Pelayanan Sosial Lanjut Usia	Pengawas	8	2.511.064,63
Kepala Seksi Pelayanan Sosial Dan Rehabilitasi Orang Dengan Kecacatan	Pengawas	8	2.511.064,63
Bendahara	Pelaksana	7	1.560.456,02
Penyusun Laporan Keuangan	Pelaksana	7	1.560.456,02
Analisis Pelayanan Sosial	Pelaksana	7	1.560.456,02
Analisis Masalah Sosial Pertama	Fungsional	8	2.511.064,63
Analisis Masalah Sosial	Pelaksana	7	1.560.456,02
Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Pelaksana	6	1.466.938,51
Pengelola Pemberdayaan Lembaga Sosial	Pelaksana	6	1.466.938,51
Pengelola Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dan Lansia	Pelaksana	6	1.466.938,51
Pranata Bencana	Pelaksana	6	1.466.938,51
Pengadministrasi Umum	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pengadministrasi Kepegawaian	Pelaksana	5	1.414.533,24

Nama Jabatan	Jenis Jabatan	Kelas	Besaran Tpp Per Jabatan/Bulan
Pengadministrasi Keuangan	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pengadministrasi Sarana Dan Prasarana	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pengadministrasi Rehabilitasi Masalah Sosial	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pramu Bakti	Pelaksana	1	1.339.448,57
Dinas Komunikasi Dan Informatika			
Kasubag Umum Dan Kepegawaian	Pengawas	8	2.511.064,63
Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik	Pengawas	9	3.121.898,06
Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik Dan Hubungan Media	Pengawas	9	3.121.898,06
Kepala Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik	Pengawas	9	3.121.898,06
Kepala Seksi Infrastruktur Dan Teknolofi	Pengawas	9	3.121.898,06
Kepala Seksi Pengembangan Dan Pengelolaan Data Aplikasi	Pengawas	9	3.121.898,06
Kepala Seksi Pengawasan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian	Pengawas	9	3.121.898,06
Kepala Seksi Layanan E-Government	Pengawas	8	2.511.064,63
Kepala Seksi Tata Kelola Persandian	Pengawas	8	2.511.064,63
Kepala Seksi Operasional Pengamanan Persandian	Pengawas	8	2.511.064,63
Bendahara Pengeluaran	Pelaksana	7	1.560.456,02
Penilik Telekomunikasi	Pelaksana	7	1.560.456,02
Perancang Grafis	Pelaksana	7	1.560.456,02
Pengawas Telekomunikasi	Pelaksana	7	1.560.456,02
Analisis Data Dan Informasi	Pelaksana	7	1.560.456,02
Analisis Persandian	Pelaksana	7	1.560.456,02
Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Pelaksana	6	1.466.938,51
Pengendali Jaringan Telekomunikasi	Pelaksana	6	1.466.938,51
Pengelola Data Persandian	Pelaksana	6	1.466.938,51
Pengadministrasi Perencanaan Dan Program	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pengadministrasi Persuratan	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pengadministrasi Umum	Pelaksana	5	1.414.533,24
Teknisi Alat Elektronik Dan Alat Komunikasi	Pelaksana	5	1.414.533,24
Operator Komunikasi	Pelaksana	5	1.414.533,24
Operator Radio	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pengemudi	Pelaksana	3	1.349.061,65
Dinas Perhubungan			
Kepala Dinas Perhubungan	Pimpinan Tinggi Pratama	14	7.375.345,37
Sekretaris	Administrator	12	5.275.634,63

Nama Jabatan	Jenis Jabatan	Kelas	Besaran Tpp Per Jabatan/Bulan
Kepala Bidang Perhubungan Darat	Administrator	11	4.071.030,35
Kepala Bidang Perhubungan Laut Dan Udara	Administrator	11	4.071.030,35
Kasubag Umum Dan Kepegawaian	Pengawas	9	3.121.898,06
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Aset, Evaluasi Dan Pelaporan	Pengawas	9	3.121.898,06
Kepala Seksi Teknik Prasarana Pengawasan Dan Keselamatan Darat/Jalan	Pengawas	9	3.121.898,06
Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana Angkutan Darat	Pengawas	9	3.121.898,06
Kepala Seksi Perhubungan Udara	Pengawas	9	3.121.898,06
Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Darat	Pengawas	8	2.511.064,63
Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut Dan Kepelabuhan	Pengawas	8	2.511.064,63
Kepala Seksi Teknik Prasarana Pengawasan Dan Keselamatan Darat/Jalan	Pengawas	8	2.511.064,63
Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	Pelaksana	7	1.560.456,02
Analisis Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan	Pelaksana	7	1.560.456,02
Bendahara	Pelaksana	7	1.560.456,02
Pengawas Keselamatan Darat/Jalan	Pelaksana	7	1.560.456,02
Pemeriksa Lalu Lintas Darat	Pelaksana	7	1.560.456,02
Pemeriksa Keselamatan Udara	Pelaksana	7	1.560.456,02
Pengelola Kepegawaian	Pelaksana	6	1.466.938,51
Pengelola Barang Persediaan	Pelaksana	6	1.466.938,51
Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Pelaksana	6	1.466.938,51
Pengelola Pelabuhan Sungai Danau Dan Penyeberangan	Pelaksana	6	1.466.938,51
Teknisi Sarana Dan Prasarana Pelabuhan	Pelaksana	6	1.466.938,51
Pengadministrasi Sarana Dan Prasarana Kantor	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pengadministrasi Umum	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pengadministrasi Keuangan	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pengadministrasi Perencanaan Dan Program	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pengadministrasi Sarana Dan Prasarana	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pengadministrasi Kecelakaan Lalu Lintas	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pengadministrasi Kinerja Operasional Pelabuhan Sungai, Danau Dan Penyeberangan	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pemelihara Kendaraan	Pelaksana	5	1.414.533,24
Operator Speed	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pengemudi	Pelaksana	3	1.349.061,65

Nama Jabatan	Jenis Jabatan	Kelas	Besaran Tpp Per Jabatan/Bulan
Petugas Keamanan	Pelaksana	3	1.349.061,65
Pramu Kebersihan	Pelaksana	1	1.339.448,57
Pramu Bakti	Pelaksana	1	1.339.448,57
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung			
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung	Pimpinan Tinggi Pratama	14	7.375.345,37
Sekretaris	Administrator	12	5.275.634,63
Kepala Bidang Pemerintahan, Pengembangan Dan Kelembagaan Kampung	Administrator	11	4.071.030,35
Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat Sumber Daya Dan Ttg	Administrator	11	4.071.030,35
Kasubag Perencanaan, Keuangan, Aset, Evaluasi Dan Laporan	Pengawas	9	3.121.898,06
Kepala Seksi Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Kampung	Pengawas	9	3.121.898,06
Kepala Seksi Fasilitas Pengembangan Pembangunan Kampung	Pengawas	9	3.121.898,06
Kepala Seksi Kelembagaan Dan Pelatihan Masyarakat	Pengawas	9	3.121.898,06
Kepala Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Pengawas	9	3.121.898,06
Kasubag Umum Dan Kepegawaian	Pengawas	8	2.511.064,63
Kepala Seksi Peningkatan Sarana Dan Prasarana Ekonomi Masyarakat	Pengawas	8	2.511.064,63
Kepala Seksi Pengelolaan Sda Dan Pemanfaatan Ttg	Pengawas	8	2.511.064,63
Bendahara	Pelaksana	7	1.560.456,02
Penyusun Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan	Pelaksana	7	1.560.456,02
Penyuluh Pembangunan Daerah Terpencil	Pelaksana	7	1.560.456,02
Penyuluh Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Pelaksana	7	1.560.456,02
Penelaah Pengembangan Usaha	Pelaksana	7	1.560.456,02
Analisis Pengembangan Ekonomi Pedesaan	Pelaksana	7	1.560.456,02
Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Pelaksana	6	1.466.938,51
Pengadministrasi Kepegawaian	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pengadministrasi Umum	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pengadministrasi Perencanaan Dan Program	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pengadministrasi Keuangan	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pengadministrasi Pemerintahan	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pengadministrasi Pelatihan	Pelaksana	5	1.414.533,24

Nama Jabatan	Jenis Jabatan	Relas	Besaran Tpp Per Jabatan/Bulan
Pengadministrasi Sarana Dan Prasarana	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pemelihara Sarana Dan Prasarana	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pramu Bakti	Pelaksana	1	1.339.448,57
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp	Pimpinan Tinggi Pratama	14	7.375.345,37
Sekretaris Dinas	Administrator	12	5.275.634,63
Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklam, Promosi Dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Administrator	11	4.071.030,35
Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan	Administrator	11	4.071.030,35
Kepala Bidang Pengaduan Kebijakan Dan Pelaporan Layanan	Administrator	11	4.071.030,35
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Aset, Evaluasi Dan Pelaporan	Pengawas	9	3.121.898,06
Kepala Seksi Perencanaan Dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Pengawas	9	3.121.898,06
Kepala Seksi Promosi Penanaman Modal	Pengawas	9	3.121.898,06
Kepala Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengawas	9	3.121.898,06
Kepala Seksi Perizinan Dan Non Perizinan I	Pengawas	9	3.121.898,06
Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Iii	Pengawas	9	3.121.898,06
Kepala Seksi Pengaduan Dan Informasi Layanan	Pengawas	9	3.121.898,06
Kepala Seksi Pelaporan Dan Peningkatan Layanan	Pengawas	9	3.121.898,06
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Pengawas	8	2.511.064,63
Kepala Seksi Perizinan Dan Non Perizinan Ii	Pengawas	8	2.511.064,63
Kepala Seksi Kebijakan Dan Penyuluhan Layanan	Pengawas	8	2.511.064,63
Bendahara Pengeluaran	Pelaksana	7	1.560.456,02
Analisis Penanaman Modal	Pelaksana	7	1.560.456,02
Analisis Pengembangan Energi	Pelaksana	7	1.560.456,02
Analisis Pengusahaan Dan Pelayanan	Pelaksana	7	1.560.456,02
Analisis Pelayanan		7	1.560.456,02
Analisis Hukum	Pelaksana	7	1.560.456,02
Penyusun Bahan Informasi	Pelaksana	7	1.560.456,02
Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Pelaksana	6	1.466.938,51

Nama Jabatan	Jenis Jabatan	Kelas	Besaran Tpp Per Jabatan/Bulan
Pengadministrasi Persuratan	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pengadministrasi Kepegawaian	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pengadministrasi Perencanaan Dan Program	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pengadministrasi Perizinan	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pengadministrasi Umum	Pelaksana	5	1.414.533,24

BUPATI TELUK WONDAMA,

CAP/TTD

HENDRIK S. MAMBOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ROBERT H. M. BAMUNAKI, SH
NIP. 19760410 200312 1 007

Lampiran III : Peraturan Bupati Teluk Wondama
 Nomor : 11 Tahun 2023
 Tanggal : 19 Januari 2023

**DAFTAR BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 BAGI APARATUR SIPIL NEGARA PADA INSPEKTORAT DAN BADAN DAERAH**

Nama Jabatan	Jenis Jabatan	Kelas	Besaran Tpp Per Jabatan/Bulan
INSPEKTORAT KABUPATEN			
Inspektur	Pimpinan Tinggi Pratama	14	9.645.321,27
Sekretaris	Administrator	12	5.275.634,63
Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Administrator	11	4.490.849,47
Inspektur Pembantu Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Administrator	11	4.490.849,47
Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan dan Keuangan	Administrator	11	4.490.849,47
Inspektur Pembantu Bidang Kemasyarakatan dan Sosial Politik	Administrator	11	4.490.849,47
Kasubag Keuangan dan Aset	Pengawas	9	3.241.022,16
Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Pengawas	9	3.241.022,16
Auditor Ahli Muda	Fungsional	9	3.360.146,26
Kasubag Umum dan Kepegawaian	Pengawas	8	2.638.724,26
Auditor Ahli Pertama	Fungsional	8	2.894.043,52
Bendahara Pengeluaran	Pelaksana	7	1.560.456,02
Pemeriksa Laporan dan Transaksi Keuangan	Pelaksana	7	1.560.456,02
Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	Pelaksana	7	1.560.456,02
Analisis Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan	Pelaksana	7	1.560.456,02
Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Pelaksana	6	1.466.938,51
Pengelola Barang Milik Negara	Pelaksana	6	1.466.938,51
Pengadministrasi Umum	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pengadministrasi Kepegawaian	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pramu Bakti	Pelaksana	1	1.339.448,57
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
Kepala BP4D	Pimpinan Tinggi Pratama	14	8.226.586,33
Sekretaris	Administrator	12	5.275.634,63

Nama Jabatan	Jenis Jabatan	Kelas	Besaran Tpp Per Jabatan/Bulan
Kepala Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya	Administrator	11	4.071.030,35
Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Administrator	11	4.071.030,35
Kepala Bidang Prasarana wilayah dan tata ruang	Administrator	11	4.071.030,35
Kepala Bidang Pengendalian dan monitoring	Administrator	11	4.071.030,35
Kasubag Keuangan dan Aset	Pengawas	9	3.121.898,06
Kasubag Evaluasi Program dan Pelaporan	Pengawas	9	3.121.898,06
Kasubid Sosial Budaya	Pengawas	9	3.121.898,06
Kasubid Pengembangan Wilayah	Pengawas	9	3.121.898,06
Kasubid Penelitian	Pengawas	9	3.121.898,06
Kasubid sarana dan prasarana wilayah	Pengawas	9	3.121.898,06
Kasubid Sumber daya alam	Pengawas	9	3.121.898,06
Kasubid tata ruang	Pengawas	9	3.121.898,06
Kasubid Pengendalian	Pengawas	9	3.121.898,06
Kasubag Umum dan Kepegawaian	Pengawas	8	2.511.064,63
Kasubid Pemerintahan	Pengawas	8	2.511.064,63
Kasubid Ekonomi	Pengawas	8	2.511.064,63
Kasubid pelaporan	Pengawas	8	2.511.064,63
Kasubid Monitoring	Pengawas	8	2.511.064,63
Bendahara	Pelaksana	7	1.560.456,02
Penyusun program anggaran dan pelaporan	Pelaksana	7	1.560.456,02
Analisis Perencanaan	Pelaksana	7	1.560.456,02
Analisis penelitian dan pengembangan	Pelaksana	7	1.560.456,02
analisis pengembangan energi	Pelaksana	7	1.560.456,02
Analisis tata ruang	Pelaksana	7	1.560.456,02
Analisis Pengendalian Pembangunan	Pelaksana	7	1.560.456,02
Penelaah data sumber daya alam	Pelaksana	7	1.560.456,02
Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Pelaksana	6	1.466.938,51
Pengelola Kepegawaian	Pelaksana	6	1.466.938,51
Pengelola data pencegahan dan monitoring	Pelaksana	6	1.466.938,51
Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pengadministrasi Umum	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pengadministrasi sarana dan pengembangan usaha	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pramu Bakti	Pelaksana	1	1.339.448,57
Pramu Kebersihan	Pelaksana	1	1.339.448,57

Nama Jabatan	Jenis Jabatan	Kelas	Besaran Tpp Per Jabatan/Bulan
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	Pimpinan Tinggi Pratama	14	8.226.586,33
Sekretaris	Administrator	12	5.275.634,63
Kepala Bidang Aset	Administrator	11	4.071.030,35
Kepala Bidang Perbendaharaan	Administrator	11	4.071.030,35
Kepala Bidang Anggaran	Administrator	11	4.071.030,35
Kepala Bidang Akuntansi	Administrator	11	4.071.030,35
Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Pengawas	9	3.121.898,06
Kasubag Keuangan dan Aset	Pengawas	9	3.121.898,06
Kasubid Aset Bergerak	Pengawas	9	3.121.898,06
Kasubid Aset Tidak Bergerak	Pengawas	9	3.121.898,06
Kasubid Aset Lain-Lain	Pengawas	9	3.121.898,06
Kasubid Kas Daerah	Pengawas	9	3.121.898,06
Kasubid Penyusunan Anggaran	Pengawas	9	3.121.898,06
Kasubid Penyediaan Anggaran	Pengawas	9	3.121.898,06
Kasubid Bina akuntansi	Pengawas	9	3.121.898,06
Kasubid Pelaporan	Pengawas	9	3.121.898,06
Kasubag Umum dan Kepegawaian	Pengawas	8	2.511.064,63
Kasubid Verifikasi	Pengawas	8	2.511.064,63
Kasubid Gaji Pegawai	Pengawas	8	2.511.064,63
Kasubid Bina Anggaran	Pengawas	8	2.511.064,63
Kasubid Akuntansi	Pengawas	8	2.511.064,63
Bendahara Bansos	Pelaksana	7	1.560.456,02
Bendahara Pengeluaran	Pelaksana	7	1.560.456,02
Penyusun kebutuhan barang Inventaris	Pelaksana	7	1.560.456,02
Pemeriksa Laporan dan Transaksi Keuangan	Pelaksana	7	1.560.456,02
Pemeriksa Anggaran	Pelaksana	7	1.560.456,02
Penata Laporan Keuangan	Pelaksana	7	1.560.456,02
Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Pelaksana	6	1.466.938,51
Pengelola Anggaran	Pelaksana	6	1.466.938,51
Pengadministrasi Persuratan	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pengadministrasi Kepegawaian	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pengadministrasi umum	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pengadministrasi Barang Milik Daerah	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pengadministrasi Keuangan	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pengadministrasi Anggaran	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pramu Bakti	Pelaksana	1	1.339.448,57
BADAN PENDAPATAN DAERAH			
Kepala Badan Pendapatan Daerah	Pimpinan tinggi Pratama	14	8.226.586,33

Nama Jabatan	Jenis Jabatan	Kelas	Besaran Tpp Per Jabatan/Bulan
Sekretaris Badan	Administrator	12	5.275.634,63
Kepala Bidang Penagihan dan Pembukuan	Administrator	11	4.071.030,35
Kepala Bidang Pendapatan dan Pendaftaran	Administrator	11	4.071.030,35
Kasubag Perencanaan, Keuangan, Aset Evaluasi dan Pelaporan	Pengawas	9	3.121.898,06
Kasubid Pembukuan	Pengawas	9	3.121.898,06
Kasubid Penagihan	Pengawas	9	3.121.898,06
Kasubid Pendaftaran dan Pendataan	Pengawas	9	3.121.898,06
Kasubid Dokumentasi dan Publikasi	Pengawas	9	3.121.898,06
Kasubag Umum dan Kepegawaian	Pengawas	8	2.511.064,63
Bendahara Pengeluaran	Pelaksana	7	1.560.456,02
Bendahara Penerimaan	Pelaksana	7	1.560.456,02
Analisis Pendapatan Daerah	Pelaksana	7	1.560.456,02
Analisis Penagihan dan Pengembalian	Pelaksana	7	1.560.456,02
Analisis Pajak dan Retribusi Daerah	Pelaksana	7	1.560.456,02
Analisis Pajak Daerah	Pelaksana	7	1.560.456,02
Analisis Penyuluh dan Layanan Informasi	Pelaksana	7	1.560.456,02
Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Pelaksana	6	1.466.938,51
Pengelola Kepegawaian	Pelaksana	6	1.466.938,51
Pengadministrasi Umum	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pengadministrasi Pajak	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pengadministrasi nota perhitungan dan retribusi daerah	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pengadministrasi data Penyajian dan Publikasi	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pengadministrasi data Peraturan dan Perundang-Undangan	Pelaksana	5	1.414.533,24
Petugas Ukur	Pelaksana	5	1.414.533,24
Juru Pungut Retribusi	Pelaksana	3	1.349.061,65
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
Kepala BKPSDM	Pimpinan tinggi Pratama	14	7.375.345,37
Sekretaris	Administrator	12	5.275.634,63
Kepala Bidang Kepegawaian	Administrator	11	4.071.030,35
Kepala Bidang Pengembangan Pegawai dan Pendidikan Pelatihan	Administrator	11	4.071.030,35
Kasubag Umum dan Kepegawaian	Pengawas	9	3.121.898,06
Kasubag Perencanaan, Keuangan, Aset, Evaluasi dan Pelaporan	Pengawas	9	3.121.898,06
Kasubid Mutasi dan Pensiun Pegawai	Pengawas	9	3.121.898,06
Kasubid Kepangkatan	Pengawas	9	3.121.898,06

Nama Jabatan	Jenis Jabatan	Kelas	Besaran Tpp Per Jabatan/Bulan
Kasubid Analisis Kebutuhan dan Pengadaan Pegawai	Pengawas	9	3.121.898,06
Kasubid Pengembangan Karir	Pengawas	9	3.121.898,06
Kasubid Pendidikan dan Pelatihan	Pengawas	9	3.121.898,06
Kasubid Dokumentasi dan Informasi Data Pegawai	Pengawas	8	2.511.064,63
Perancang Sistem informasi Kepegawaian	Pelaksana	7	1.560.456,02
Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Pelaksana	7	1.560.456,02
Bendahara	Pelaksana	7	1.560.456,02
Penyusun Rencana Mutasi	Pelaksana	7	1.560.456,02
analisis Kinerja	Pelaksana	7	1.560.456,02
Analisis Pengembangan Energi	Pelaksana	7	1.560.456,02
Analisis Perencanaan dan Program	Pelaksana	7	1.560.456,02
Analisis Jabatan	Pelaksana	7	1.560.456,02
analisis Informasi SDM dan Aparatur	Pelaksana	7	1.560.456,02
Analisis Perencanaan Kebutuhan SDM	Pelaksana	7	1.560.456,02
Analisis Pengembangan Karir	Pelaksana	7	1.560.456,02
analisis Program Diklat	Pelaksana	7	1.560.456,02
Analisis Diklat	Pelaksana	7	1.560.456,02
Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Pelaksana	6	1.466.938,51
Pengelola Kepegawaian	Pelaksana	6	1.466.938,51
Pengelola Data	Pelaksana	6	1.466.938,51
Pengelola Sistem informasi Manajemen Kepegawaian	Pelaksana	6	1.466.938,51
Pengadministrasi Umum	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pengadministrasi Kepegawaian	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pengadministrasi Ijin belajar/tugas belajar	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pengadministrasi Pelatihan	Pelaksana	5	1.414.533,24
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
Kepala Badan Kesbangpol	Pimpinan Tinggi Pratama	14	7.375.345,37
Sekretaris	Administrator	12	5.275.634,63
Kepala Bidang Ideologi dan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa	Administrator	11	4.071.030,35
Kepala Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa	Administrator	11	4.071.030,35
Kepala Bidang Ketahanan, Ekonomi, sosbud, Agama dan Ormas	Administrator	11	4.071.030,35
Kepala Bidang Kewaspadaan nasional dan penanganan konflik	Administrator	11	4.071.030,35

Nama Jabatan	Jenis Jabatan	Kelas	Besaran Tpp Per Jabatan/Bulan
Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Pengawas	9	3.121.898,06
Kasubag Keuangan dan Aset	Pengawas	9	3.121.898,06
Kasubid Pendidikan politik dan peningkatan demokrasi	Pengawas	9	3.121.898,06
Kasubid Fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan Parpol	Pengawas	9	3.121.898,06
Kasubag Umum dan Kepegawaian	Pengawas	8	2.511.064,63
Kasubid ideologi dan wawasan kebangsaan	Pengawas	8	2.511.064,63
Kasubid Bela Negara dan Karakter Bangsa	Pengawas	8	2.511.064,63
Kasubid organisasi kemasyarakatan	Pengawas	8	2.511.064,63
Kasubid kewaspadaan dini dan kerjasama intelejen	Pengawas	8	2.511.064,63
Kasubid Penanganan Konflik	Pengawas	8	2.511.064,63
Penyusun Laporan Keuangan	Pelaksana	7	1.560.456,02
Penyusun Program anggaran dan pelaporan	Pelaksana	7	1.560.456,02
Bendahara Pengeluaran	Pelaksana	7	1.560.456,02
Analisis Politik dalam negeri	Pelaksana	7	1.560.456,02
Analisis Pengembangan sarana dan prasarana pembelajaran	Pelaksana	7	1.560.456,02
Pengadministrasi umum	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pengadministrasi keuangan	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pengadministrasi Kepegawaian	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pramu Bakti	Pelaksana	1	1.339.448,57
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
Kepala Pelaksana BPBD	Pimpinan tinggi Pratama	14	7.375.345,37
Sekretaris	Administrator	12	5.275.634,63
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Administrator	11	4.071.030,35
Kepala Bidang Kedaruratan dan logistik	Administrator	11	4.071.030,35
Kepala Bidang Rehabilitasi dan rekonstruksi	Administrator	11	4.071.030,35
Kasubag Umum dan Kepegawaian	Pengawas	9	3.121.898,06
Kasubag Program, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan	Pengawas	9	3.121.898,06
Kepala Sub Bidang Informasi Survey dan data	Pengawas	9	3.121.898,06
Kepala Sub Bidang Tanggap Darurat	Pengawas	9	3.121.898,06
Kepala Sub Bidang Rehabilitasi fisik	Pengawas	9	3.121.898,06
Kepala Sub Bidang Rekonstruksi	Pengawas	9	3.121.898,06

Nama Jabatan	Jenis Jabatan	Kelas	Besaran Tpp Per Jabatan/Bulan
Kepala Sub Bidang Perencanaan Penanggulangan bencana	Pengawas	8	2.511.064,63
Kepala Sub Bidang Logistik	Pengawas	8	2.511.064,63
analisis Kepegawaian	Pelaksana	7	1.560.456,02
Bendahara	Pelaksana	7	1.560.456,02
Analisis Pengurangan resiko bencana	Pelaksana	7	1.560.456,02
Analisis kerusakan fisik dan bangunan	Pelaksana	7	1.560.456,02
analisis Jembatan jalan	Pelaksana	7	1.560.456,02
Pengelola Bahan Perencanaan	Pelaksana	6	1.466.938,51
Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Pelaksana	6	1.466.938,51
Pengadministrasi Umum	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pengadministrasi Kepegawaian	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pengadministrasi sarana dan prasarana	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pengemudi	Pelaksana	3	1.349.061,65
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Pimpinan Tinggi Pratama	14	7.375.345,37
Sekretaris	Administrator	12	5.275.634,63
Kepala Bidang Penegak Perda	Administrator	11	4.071.030,35
Kepala Bidang Trantib	Administrator	11	4.071.030,35
Kepala Bidang Damkar	Administrator	11	4.071.030,35
Kasubag Perencanaan, Keuangan, Aset, Evaluasi dan Pelaporan	Pengawas	9	3.121.898,06
Kepala Seksi pembinaan dan pengawasan	Pengawas	9	3.121.898,06
Kepala Seksi Pencegahan Kebakaran	Pengawas	9	3.121.898,06
Kepala Seksi Penanganan Kebakaran	Pengawas	9	3.121.898,06
Kasubag umum dan Kepegawaian	Pengawas	8	2.511.064,63
Kepala Seksi sosialisasi dan Penyuluhan	Pengawas	8	2.511.064,63
Kepala Seksi Penyidik dan Penyelidikan	Pengawas	8	2.511.064,63
Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian	Pengawas	8	2.511.064,63
Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat	Pengawas	8	2.511.064,63
Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat	Pengawas	8	2.511.064,63
Kepala Seksi Sarana dan Prasarana	Pengawas	8	2.511.064,63
Penata Laporan Keuangan	Pelaksana	7	1.560.456,02
Bendahara Pengeluaran	Pelaksana	7	1.560.456,02
Analisis penindakan	Pelaksana	7	1.560.456,02
Analisis Pencegahan kebakaran	Pelaksana	7	1.560.456,02
Pengelola Pemanfaatan barang Milik daerah	Pelaksana	6	1.466.938,51
Pengolah data penyuluhan dan layanan informasi	Pelaksana	6	1.466.938,51

Nama Jabatan	Jenis Jabatan	Kelas	Besaran Tpp Per Jabatan/Bulan
Pengolah data penyuluhan dan layanan informasi	Pelaksana	6	1.466.938,51
Pengadministrasi Umum	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pengadministrasi perencanaan dan program	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pengadministrasi data peraturan perundang-undangan	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	Pelaksana	5	1.414.533,24
Komandan Petugas Keamanan	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pranata Perlindungan Masyarakat	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pranata Pasukan Pengamanan Dalam	Pelaksana	5	1.414.533,24
Petugas Keamanan	Pelaksana	5	1.414.533,24
Pengemudi Mobil kebakaran	Pelaksana	3	1.349.061,65
Pramu Bakti	Pelaksana	1	1.339.448,57

BUPATI TELUK WONDAMA,

CAP/TTD

HENDRIK S. MAMBOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ROBERT H. M. NUNAKI, SH
NIP. 19760410 200312 1 007